



## **MUTU PENDIDIKAN ISLAM DITINJAU DARI PRAKTIK DUALISME PENDIDIKAN NASIONAL**

**Muhammad Rizal<sup>1</sup>, Iskandar<sup>2\*</sup>, Ahmad Suryadi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, 15419, Indonesia.

<sup>2</sup>Program Studi Administrasi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Almuslim, Bireuen, 24267, Indonesia

<sup>3</sup>Program Studi Magister Teknologi Pendidikan, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Tangerang Selatan, 15419, Indonesia.

\*Email korespondensi : [iskandaridris@umuslim.ac.id](mailto:iskandaridris@umuslim.ac.id)<sup>2</sup>

Diterima Maret 2024; Disetujui Juni 2024; Dipublikasi 31 Juli 2024

**Abstract:** *This article investigates the quality of Islamic education in the practice of dualism in Indonesia. This dichotomy is related to differences in the quality of Islamic education, as well as its implications for graduates of Islamic education institutions in the field. Through literature research, it shows that dualism in the management and implementation of Islamic education in Indonesia creates significant challenges, including non-uniformity in educational standards, an imbalance between religious education and general knowledge, as well as gaps in the quality of education between institutions. However, this article also identifies efforts to overcome this dualism, such as curriculum integration programs and capacity building for education managers. By analyzing quality in the dualistic dynamics of Islamic education management, this article provides valuable insight for education stakeholders, including the government, educational institutions, and the wider community, to develop a more holistic and integrated strategy in improving the quality and relevance of Islamic education in Indonesia.*

**Keywords;** *Education Standards, Dynamics of Dualism, Curriculum Integration, Islamic Education*

**Abstrak:** Artikel ini menginvestigasi kualitas pendidikan Islam dalam praktik dualisme di Indonesia. Dikotomi ini terkait dengan perbedaan kualitas pendidikan Islam, serta implikasinya terhadap lulusan lembaga pendidikan Islam di lapangan. Melalui penelitian kepustakaan, menunjukkan bahwa dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia menciptakan tantangan signifikan, termasuk ketidakseragaman dalam standar pendidikan, ketidakseimbangan antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum, serta kesenjangan dalam kualitas pendidikan antar lembaga. Namun, artikel ini juga mengidentifikasi upaya-upaya untuk mengatasi dualisme ini, seperti program-program integrasi kurikulum dan pembangunan kapasitas bagi para pengelola pendidikan. Dengan menganalisis kualitas dalam dinamika dualisme pengelolaan pendidikan Islam, artikel ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat luas, untuk mengembangkan strategi yang lebih holistik dan terpadu dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan Islam di Indonesia.

**Kata kunci :** **Standar Pendidikan, Dinamika Dualisme, Integrasi Kurikulum, Pendidikan Islam**

## PENDAHULUAN

Pendidikan Islam telah menjadi bagian integral dari sistem pendidikan di Indonesia, yang memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Namun, dalam pengelolaan dan penyelenggaraannya, terdapat fenomena yang dikenal sebagai praktik dualisme. Dualisme ini merujuk pada perbedaan signifikan dalam pendekatan, kurikulum, dan tujuan antara lembaga pendidikan Islam dengan pendidikan umum yang modern (Mustikaningrum et al., 2020). Sudah menjadi konsumsi publik, bahwa pendidikan Islam di Indonesia selalu termarginalkan dalam kancah sistem pendidikan Indonesia, padahal semua tujuan pendidikan ingin menghantarkan peserta didiknya menjadi manusia yang bermartabat mulia agar mampu menjadi khalifah di muka bumi (Bakar, 2015).

Ketertinggalan pendidikan Islam di Indonesia sangat nyata terlihat dari eksistensi lembaga pendidikan Islam yang tidak memiliki peran strategis dalam pembangunan ummat muslim khususnya di Indonesia. Hal ini tercermin dalam struktur pengelolaan yang tidak selalu konsisten, kurikulum yang beragam, dan tujuan pendidikan yang mungkin bertentangan satu sama lain (Fardinal et al., 2022). Dibagian lain, pendidikan Islam belum mampu menghadirkan kurikulum sendiri di Negara yang mayoritas penganut muslim terbesar di dunia yang mampu dikonsumsi pada lembaga pendidikan umum. Sebagai contoh, bahwa apapun perubahan kurikulum di ranah pendidikan umum, pengelola dan pengambil kebijakan pendidikan Islam tetap mengikuti kurikulum pendidikan umum.

Demikian halnya dengan pembinaan kualitas guru pendidikan Islam, masih banyak ditemui persoalan klasik bahwa guru pendidikan Islam tidak dapat mengatasi tantangan globalisasi yang menuntut perubahan dan inovasi di bidang pendidikan karena mereka biasanya menggunakan pola lama yang telah diwariskan dari generasi ke generasi (Madaniyah et al., 2020).

Begitu juga dengan out put lulusan antar pendidikan, yang mengakibatkan lembaga pendidikan Islam kurang diminati serta ketidakseimbangan dalam penekanan antara pendidikan agama dan ilmu pengetahuan umum. Ditambah lagi dengan sistem perpolitikan di Indonesia yang tidak mendukung lembaga pendidikan Islam mandiri dalam hal kurikulum (Nur Hasanah, 2023). Dalam konteks ini, kajian pustaka terkait praktik dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia telah menghasilkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena ini.

Febriana dalam penelitiannya menjelaskan Departemen Agama sebagai otoritas pengelolaan pendidikan agama berhadapan dengan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selaku pengelola pendidikan umum sehingga muncul persoalan adanya dikotomisasi kurikulum, diskriminasi lulusan, kebijakan moneter yang tidak seimbang dan lain-lain. Bentuk dualisme dan dikotomi pendidikan itu dapat dilihat dari kebijakan pemerintah baik dari kebijakan dalam undang-undang pendidikan nasional, Peraturan Pemerintah (Febriana & Firmasari, 2021).

Subhan menyatakan sampai dengan masa reformasi, pemerintah masih mempertahankan

dualisme dalam sistem pendidikan nasional, yaitu antara Kemenag dan Kemendiknas, dan antara madrasah dengan sekolah umum. Usaha untuk menyatukan pendidikan agama dan umum di Indonesia sejatinya telah lama dilakukan pemerintah. Maka tidak heran, jika kita seringkali menemukan perlakuan yang tidak imbang antara madrasah dan sekolah umum, mulai dari diskriminasi anggaran, bantuan pemerintah, serta hak kesetaraan (Ahmad Ma'ruf, 2016). Di sisi lain, Muh Zakaria menyoroti masalah anggaran dalam dualisme sistem pendidikan, bahwa terbentuknya dualisme kebijakan yang dibuat pemerintah masih membentuk struktur kelas dan pendidikan semakin mahal di tiap daerah. sebagai contoh solusi desentralisasi yang ditetapkan sisdiknas dengan tujuan penyetaraan mutu, kesempatan mendapatkan pendidikan yang layak, dan mudahnya mengakses pendidikan, ini yang menyebabkan kualitas pendidikan islam terasa tidak terukur dan terurus dengan maksimal (Zakaria, 2022).

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang praktik dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia menjadi sangat penting. Dengan mengidentifikasi akar permasalahan dan tantangan yang dihadapi, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mempromosikan pendidikan Islam yang berkualitas, relevan, dan inklusif bagi semua lapisan masyarakat.

Penelitian ini menyajikan pendekatan terintegrasi yang lebih komprehensif dalam memahami kualitas pendidikan Islam yang semakin menantang dalam praktik dualisme sistem pendidikan di Indonesia. Sebagai kontras,

penelitian terdahulu cenderung lebih fokus pada aspek-aspek tertentu seperti regulasi, sistem pengelolaan lembaga, atau peran pemerintah, sementara penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran yang lebih holistik tentang kualitas pendidikan Islam dalam tataran praktik dualism sistem pendidikan di Indonesia.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Mutu Pendidikan Islam di Indonesia**

Pengertian "mutu pendidikan" mengacu pada standar atau kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi seberapa baik suatu sistem pendidikan atau lembaga mencapai tujuan pendidikannya. Pengertian ini menekankan pentingnya mencapai standar dan tujuan yang telah ditetapkan dalam sistem pendidikan sambil terus meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan hasil pembelajaran siswa dan kontribusi pendidikan terhadap perkembangan sosiokultural (Singh, 2013). Kualitas pendidikan Islam dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor utama yang meliputi:

1. **Konten Kurikulum:** Kualitas pendidikan Islam dapat diukur dari kecukupan dan keberagaman konten kurikulum.
2. **Kualitas Pengajaran:** Menilai kualitas guru dan pengajar dalam menyampaikan materi pelajaran dengan jelas, menggunakan metode pengajaran yang efektif, dan mampu merangsang minat dan pemahaman siswa adalah penting.
3. **Pengembangan Karakter dan Moralitas:** Kualitas pendidikan Islam juga dapat diukur dari kemampuannya dalam mengembangkan karakter dan moralitas.

4. **Infrastruktur Pendidikan:** Kualitas fasilitas fisik dan pendidikan juga penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan Islam. Fasilitas yang memadai dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa.
5. **Evaluasi dan Pemantauan:** Sistem evaluasi yang efektif untuk menilai kemajuan siswa dan pemantauan terhadap kurikulum dan pengajaran merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan Islam.
6. **Kerjasama dengan Komunitas:** Kualitas fasilitas pendidikan Islam dapat diukur dengan menggunakan metrik yang tepat (Szegeedi et al., 2024).

### **Dinamika Kualitas Pendidikan Islam**

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 mungkin telah membuka jalan bagi kemajuan pendidikan Islam. Secara konseptual, Undang-Undang SISDIKNAS baru dianggap sebagai titik balik pencerahan dalam pengembangan, dan peningkatan sistem pendidikan Islam di Indonesia. Dalam hal peningkatan kualitas, undang-undang ini sangat relevan. Seolah-olah ada dorongan baru untuk mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia. Bukan karena nilai-nilai atau ikatan keagamaan masyarakat telah berubah, tetapi karena masyarakat kurang tertarik untuk memilih lembaga pendidikan Islam (Permatasari, 2017). Ini lebih karena mereka tidak menjanjikan masa depan dan tidak responsif terhadap tuntutan saat ini dan akan datang. Namun, paling tidak ada tiga hal yang menjadi perhatian publik dalam.

Dalam kenyataannya, kemampuan pendidikan umat Islam, baik melalui madrasah dan sekolah maupun pendidikan tinggi, tampaknya belum menjadi daya tarik yang nyata. Karena itu, Malik Fadjar dalam (Email:, 2021) mengatakan bahwa pembenahan dan pengembangan harus dilakukan melalui dua pendekatan: *microscopic* (tinjauan mikro) dan *macroscopic* (tujuan makro). Metode pertama melihat pendidikan dalam kaitannya dengan kerangka sosial yang lebih luas. Metode kedua melihat pendidikan sebagai satu kekuatan yang dinamis dan interaktif.

### **Implikasi Dualisme Terhadap Output**

Dualisme pendidikan di Indonesia terjadi karena adanya sebuah pendikotomian yang dilakukan dalam ilmu pengetahuan. Pengelolaan pendidikan dibawah dua payung yakni Kemendikbud dan Kemenag terbukti telah merugikan berbagai pihak, terutama terhadap pendidikan Islam. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pemerintah yang selama ini tidak memberikan apresiasi yang sepatutnya kepada pendidikan islam, karena pendidikan islam hanya dianggap sebagai pelengkap saja, bukan sebagai komponen utama dalam pendidikan Nasional. Selain itu banyak orang yang masih menganggap bahwa sekolah-sekolah yang berada dibawah naungan Kemenag, terkesan sebagai sekolah yang religius, tertinggal, dan tradisional. Dan apabila ditelisik dari segi kelembagaannya, Kemenag tidak memiliki wewenang dan otoritas yang kuat dalam pendidikan Nasional yang pada akhirnya mengakibatkan kebijakan-kebijakan yang dibuat Kemenag tidak memiliki substansi yang jelas, dan hanya mengekor pada kebijakan yang

ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Mukhlisin, 2021).

Pemerintah harus segera mengambil langkah tegas terhadap sistem dualisme yang ada dalam pendidikan di Indonesia saat ini, sehingga tidak ada lagi diskriminasi yang ditimbulkan dari keduanya. Di sisi lain, agar pendidikan Islam tidak kehilangan daya tariknya sebagai sebuah sistem pendidikan, diperlukan adanya perubahan dalam paradigma, bangunan, dan kerangka berfikir yang memadai dalam pendidikan Islam itu sendiri.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan sumber data dari literatur ilmiah berupa artikel jurnal, dokumen kebijakan pendidikan, dan buku-buku yang berkaitan dengan tema dan kajian penelitian.

Data sekunder yang dikumpulkan dan dianalisis dalam penelitian literatur ini digunakan untuk menghasilkan kesimpulan yang objektif tentang mutu pendidikan Islam. Data sekunder termasuk buku, jurnal, artikel, situs web, dan lainnya yang berkaitan dengan mutu pendidikan Islam.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi dengan mencari dan menganalisis dokumen-dokumen terkait. Pengolahan data dilakukan dengan empat tahap, di antaranya: pengumpulan data, reduksi data, display data, dan langkah terakhir yaitu verifikasi data (Mulyatiningsih & A., 2005). Empat prosedur pengolahan data tersebut diharapkan dapat menghasilkan temuan yang valid.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **Fenomenologi Dualisme dalam Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Islam**

Sumber daya manusia merupakan tiang dalam sebuah organisasi ataupun lembaga, tidak terkecuali lembaga pendidikan. Maka pengelolaan atau manajemen SDM memiliki peran yang penting dalam organisasi, terlebih organisasi yang bergerak di bidang jasa. Hal ini dikarenakan SDM bersentuhan langsung dengan kualitas jasa yang diterima oleh konsumen. Dikatakan bahwa efektivitas manajemen SDM memiliki dampak yang paling besar jika dibandingkan manajemen sumber daya lain. Jika SDM tidak terkelola dengan baik, maka efektifitas yang dimaksud tidak akan tercapai

Problem yang dihadapi madrasah meliputi seluruh sistem kependidikannya, terutama sistem manajemen dan etos kerja yang rendah, kualitas dan kuantitas pendidik yang kurang memadai, kurikulum yang tidak efektif, dan sarana fisik serta fasilitas yang masih belum cukup. Karena faktor-faktor tersebut menjadikan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah ditinggalkan oleh masyarakat, kurang mendapat respon dari masyarakat. sehingga eksistensinya menjadi termarginalkan dari dunia pendidikan masyarakat (A. Muhammad, 2021).

Ketertinggalan madrasah selama ini, juga dilatarbelakangi oleh tiga faktor penting yaitu: Pertama, tradisi yang dikembangkan masih berorientasi ke masa silam yang berciri konservatisme. Kedua, mutu penyelenggaraan yang sangat rendah sehingga profesionalisme tidak jelas. Ketiga, relevansi pendidikan Islam yang kurang mampu merespon tuntutan perkembangan

baru yang riil.

Kalau dipetakan secara umum, problematika pendidikan madrasah yang terjadi dan sedang dihadapi saat ini berpusat pada kurikulum, sarana dan prasarana, tenaga pendidik, dan koordinasi antar lembaga/ kementerian.

Pertama, kurikulum. Implementasi Kurikulum Merdeka (KM) masih belum *massif*. Jangankan (Kurikulum Merdeka) yang baru di-*launching* awal tahun 2022, Kurikulum 2013 (kurikulum sebelumnya) saja belum 100% terimplementasikan di madrasah. Tapi sudah ingin mengimplmentasikan kurikulum merdeka, guru-guru masih kebingungan kurikulum mana yang harus dipakai.

Maka solusi yang diperlukan adalah tersedia waktu dan dana yang cukup besar untuk melakukan sosialisasi (terlebih dahulu) ke kepala madrasah dan guru untuk implementasi KM tersebut. Problem lainnya, belum ada konsolidasi dan integrasi antara Kementerian Agama (selaku pemegang kebijakan terkait pendidikan madrasah) dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (selaku pemegang kebijakan pendidikan nasional) dalam hal implementasi Kurikulum Merdeka. Perlu duduk bareng untuk merumuskan implementasi kurikulum merdeka secara berkesinambungan, terprogram dan sistematis *milestonenya*.

Kedua, sarana dan prasarana. Pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan madrasah belum maksimal hingga saat ini, terutama untuk madrasah-madrasah swasta. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan dana selalu menjadi alasan utama. Seiring dengan

meningkatnya kepercayaan madrasah terhadap madrasah, mau tidak mau, madrasah harus menambah ruang-ruang belajar yang baru, menambah fasilitas-fasilitas pendidikan lainnya yang menunjang iklim akademik di madrasah akibat dari gemuknya jumlah siswa. Beban sarana dan prasarana untuk madrasah tentu tidak bisa ditimpakan seluruhnya kepada pemerintah. Direktorat KSKK Madrasah pernah melakukan simulasi bantuan rehab berat dan sedang untuk madrasah-madrasah swasta dengan jumlah anggaran yang ada sekarang ini. Mereka (madrasah swasta) baru bisa mendapatkan bantuan dari anggaran DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Direktorat Pendidikan Islam itu setelah antri 20-25 tahun.

Solusinya harus ada skema kemandirian madrasah perlu dipromosikan, bagaimana madrasah mampu membiayai dirinya sendiri melalui unit-unit usaha yang menjanjikan. Mungkin, hal ini sudah dilakukan oleh sejumlah madrasah yang memiliki basis pesantren. Namun belum menjadi sebuah gerakan yang *massif* untuk mengatakan tidak ada sama sekali.

Ketiga, sumber daya manusia (SDM) untuk guru dan tenaga pendidik belum proporsional. Perlu dihitung formasi idealnya berapa sesuai rumus rasio guru, murid dan tenaga pendidik. Oleh sebab itu, perlu adanya data yang menunjukkan peta kebutuhan/ formasi dan sebaran guru dan tendik madrasah di seluruh Indonesia dan kebijakan/regulasi pemerataannya. *Madrasah* di daerah-daerah tertentu kekurangan guru, defisit guru, namun madrasah-madrasah di daerah lainnya kelebihan guru. Guru-guru dengan kualitas yang

baik musti juga didistribusikan secara adil dan seimbang ke daerah-daerah yang membutuhkan, supaya tingkat kecerdasan anak di satu daerah dengan daerah lainnya juga sama atau tidak timpang.

Keempat, berkolaborasi, berkoordinasi dan bersinergi dengan lembaga/kementerian lain. Dalam banyak hal, pengelolaan dan manajerial pendidikan madrasah tidak bisa berdiri sendiri, mesti bekerjasama dengan pihak lain, terutama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), baik di Pusat maupun Dinas Pendidikan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sinkronisasi kebijakan terkait regulasi pendidikan, kurikulum, program/kegiatan dan sebagainya musti dilakukan secara berkesinambungan. Dalam hal proporsi anggaran, Kementerian Agama RI juga berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Bappenas, dan Kementerian Keuangan. Terkait dengan pendirian madrasah negeri, penegerian madrasah dan ijin operasional madrasah, Kementerian Agama juga berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenpan RB, Bappenas dan pihak-pihak lainnya (P. R. Muhammad & Bagus Wiguna, 2023).

Keempat hal tersebut rasanya sangat mendesak untuk segera dilakukan. Mengingat perkembangan dunia pendidikan semakin cepat dan disruptif

### **Standar Pendidikan Islam**

#### **Pendidikan Islam di Sekolah Umum**

Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum (SD, SMP, SMA, SMK) bertujuan untuk meningkatkan keimanan, pemahaman, serta penghayatan dan pengalaman peserta didik tentang

Agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt. Selain itu berakhlak mulia dalam kehidupan pribadi, masyarakat, serta berbangsa dan bernegara. sehingga, aspek afektif dalam pembelajaran harus mendapatkan perhatian yang lebih besar. Oleh karena itu pendidikan sekolah di Indonesia dimasukkan ke dalam kurikulum nasional yang wajib diikuti oleh semua anak didik mulai dari SD sampai dengan perguruan tinggi. Tujuan pendidikan Agama Islam di SD yaitu: (Basyit, 2019)

- a. Menumbuh kembangkan aqidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah swt;
- b. Mewujudkan manusia Indonesia yang taat beragama dan berakhlak mulia yaitu manusia yang berpengetahuan, rajin beribadah, cerdas, produktif, jujur, adil, etis, berdisiplin, bertoleransi (*tasamuh*), menjaga keharmonisan secara personal dan sosial serta mengembangkan budaya agama dalam komunitas sekolah.

Di tingkat sekolah dasar, mata pelajaran agama Islam diajarkan dari kelas satu hingga kelas enam. Pendidikan Agama Islam bersifat komprehensif dan dalam satu kesatuan (integral) yaitu sebagai unsur Islam yang terkandung di dalamnya. Pelajaran tersebut meliputi Fiqh, Arab, Akidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Al-Qur'an dan Hadits yang telah dikompilasi dalam

Mapel PAI. Pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam siswa mempunyai standar kompetensi yang harus dikuasai selama mengecap Pendidikan Agama Islam di SD yang meliputi sikap efektif dan mental. Ilmu kognitif juga memiliki peran penting dalam memberikan dukungan guna memperkuat kepercayaan serta ketaqwaan kepada Allah SWT. Pendidikan Agama Islam di sekolah bertujuan untuk:(Wahab, 2016)

1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Allah SWT dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, penghayatan terhadap ayat-ayat Allah yang tercipta dan tertulis (ayat *kauniyyah* dan ayat *qauliyyah*).
2. Membentuk karakter muslim dalam diri peserta didik melalui pengenalan, pemahaman, dan pembiasaan norma-norma dan aturan-aturan Islam dalam melakukan relasi yang harmonis dengan Tuhan, diri sendiri, sesama, dan lingkungannya.
3. Mengembangkan nalar dan sikap moral yang selaras dengan keyakinan Islam dalam kehidupan sebagai warga masyarakat, warga negara, dan warga dunia

Keseluruhan materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) yang umumnya diajarkan di sekolah yang mencakup tujuh unsur pokok: Al-Qur'an-Hadits, keimanan, *syari'ah*, ibadah, muamalah, akhlak dan *tarikh* (sejarah Islam) dimana ketujuh unsur ini sekaligus menggambarkan bahwa ruang lingkup Pendidikan Agama Islam (PAI) mencakup perwujudan keserasian, keselarasan dan keseimbangan hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri, sesama manusia, makhluk hidup lainnya maupun

lingkungannya (Hablum Minallah wa Hablum Minannas) (Achmad Sudaryo, 2023).

### **Pendidikan Islam di Madrasah**

Kurikulum madrasah memiliki beban yang lebih banyak dibandingkan dengan kurikulum yang ada pada sekolah. Hal ini dikarenakan Madrasah mengajarkan seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah ditambah dengan mata pelajaran Agama yang lebih banyak dibandingkan dengan jam yang ada pada sekolah. karena ciri khas madrasah adalah sekolah yang bercirikan Agama Islam. Dengan ciri khas madrasah yaitu; Madrasah mengajarkan seluruh mata pelajaran yang ada di sekolah, Mata pelajaran Agama memiliki jam yang lebih di dalam madrasah.

Madrasah memiliki tiga tingkatan satuan pada jenjang pendidikannya yaitu; Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Pada tiap jenjangnya terdapat materi Pendidikan Agama Islam yang terdiri dari;(Hadi et al., 2022)

1. Al-Qur'an Hadis, Merupakan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dimana isinya adalah mengenai tata cara menulis dan membaca Alquran dengan benar dan juga baik. Memahami makna hadis secara teks ataupun kontekstual yang kemudian kadungan yang ada pada hadis tersebut dapat dijadikan dasar dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari.
2. Akidah Akhlak. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang berfokus pada Akidah yakni membentuk peserta didik agar memiliki keyakinan dan keimanan yang kokoh akan keimanannya hingga dapat mengamalkan



Asmaul husna, pada point akhlak Membentuk peserta didik yang memiliki akhlak yang baik (mahmudah) dan berusaha menghindari akhlak buruk (mazmumah).

3. Fikih Salah satu mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang membahas mengenai ketentuan suatu hukum dan juga tata cara beribadah dan bermuamalah dalam kehidupan.

### **Upaya-Upaya Untuk Mengatasi Dualisme**

Solusi untuk mengurangi atau meniadakan dualisme dalam pendidikan dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip keseimbangan yang mendasari pendidikan Islam yaitu keseimbangan antara kehidupan duniawi dan ukhrawi, keseimbangan antara jasmani dan rohani, serta keseimbangan antara individu dan masyarakat. Al-Faruqi menawarkan islamisasi ilmu ke dalam pendidikan Islam dengan melebur dua sistem pendidikan; tradisional dan modern, menjadi sistem pendidikan yang berwawasan Islam. Ini dimaksudkan untuk menghilangkan problem dualisme dalam sistem pendidikan. Ide tersebut berisikan suatu prinsip bahwa keilmuan barat tidak harus ditolak, artinya perlu diterima, tetapi harus melalui proses filterisasi yang disejalankan dengan nafas Islami agar tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Untuk memecahkan masalah dualisme pendidikan, merupakan al-Faruqi memecahkan problem dualisme pendidikan adalah islamisasi ilmu dalam pendidikan Islam. Menurut al-Faruqi, jalannya adalah melakukan islamisasi ilmu. Menurutnya, para akademisi Islam hendaknya memberi solusi melalui islamisasi ilmu. Artinya, akademisi muslim harus menguasai semua disiplin ilmu modern, memahami disiplin

tersebut dengan sempurna, dan merasakan itu sebagai perintah agama. Setelah itu, mereka harus mengintegrasikan pengetahuan baru tersebut ke dalam keutuhan warisan Islam dengan melakukan eliminasi, perubahan, penafsiran kembali, dan penyesuaian terhadap komponen-komponennya sebagai world view Islam dan menetapkan nilai-nilainya (Amaliya, 2007).

Selanjutnya, mendorong pemerintah untuk mengintegrasikan pendidikan umum dan pendidikan agama ke dalam satu sistem. Sebagai bagian dari proses pencarian rumusan sistem pendidikan nasional yang tunggal, pergumulan itu secara bertahap harus menghasilkan penyesuaian-penyesuaian yang signifikan. Tentu butuh proses yang panjang dan mungkin terjadi ketegangan politik di antara komponen yang berbeda pandangan. Gagasan tentang pendidikan nasional di bawah satu atap berarti penghilangan "dualisme" penyelenggaraan pendidikan di Indonesia seperti yang dijalankan selama ini, sebenarnya bukan suatu hal baru. Pada masa Orde Baru, Mendikbud pernah mengemukakan gagasan ini yang berarti bahwa semua lembaga pendidikan, termasuk lembaga pendidikan keagamaan, diurus di departemennya. Pada saat itu, gagasan ini mendapat reaksi keras dari kalangan pemimpin dan organisasi Islam, terutama karena pertimbangan politis, yakni kekhawatiran akan adanya proses sekularisasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Di samping itu, umat Islam yang pada waktu itu termarginalisasi secara politis, berpikir bahwa keberadaan pendidikan keagamaan bukan hanya sekadar bentuk kelembagaan, tetapi juga merupakan simbolisme politik Islam di Indonesia.

Selang 20 tahun kemudian, gagasan itu kembali muncul pada masa kekuasaan Presiden Abdurrahman Wahid yang akrab dipanggil dengan Gus Dur. Memang Gus Dur tidak secara eksplisit menyatakan perlunya pendidikan nasional dalam satu atap, namun kebijakannya tentang perubahan nama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Kemendiknas dapat menjadi indikasi ke arah penyatuatapan ini. Kali ini, gagasan penyatuan pendidikan nasional ini disambut biasa-biasa saja, dalam arti tidak ada penolakan keras maupun penerimaan dengan penuh kegembiraan. Tiadanya penolakan ini bisa jadi karena umat Islam sudah berada dalam *center of power* sehingga pendidikan keagamaan di bawah Kemenag bukan merupakan satu-satunya ekspresi simbolik politik Islam (Wahab, 2016).

Oleh karena itu, menurut penulis dalam rangka menyikapi dan menangani dualisme pendidikan di Indonesia, maka ada beberapa langkah yang ditawarkan yaitu (Noor, 2017):

1. Harus ada keberanian pemerintah dan DPR untuk merevisi Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), terutama pasal yang mengatur tentang penyelenggara pendidikan di Indonesia. Mengingat adanya dampak-dampak negatif yang dimunculkan terhadap perkembangan pendidikan nasional.
2. Harus ada keinginan yang kuat dan action nyata dari pihak perguruan tinggi, baik PTUN maupun PTAI sebagai lembaga keilmuan dan pencetak "*agent of change*" dalam mengintegrasikan ilmu umum dan agama itu sendiri dan dilanjutkan dengan sosialisasi pemahaman berupa kajian-kajian kepada

pemerintah dan masyarakat akan dampak-dampak yang ditimbulkan jika dualisme pendidikan di Indonesia ini terus dipertahankan.

3. Masyarakat harus mengubah cara pandang terhadap dualisme pendidikan. Bahwa pendidikan yang diselenggarakan oleh dua lembaga dalam sebuah Negara akan menyebabkan kebingungan dan tumpang tindih antar lembaga yang menaungi pendidikan di Indonesia.

## PEMBAHASAN

Praktik dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan keragaman dalam pendidikan Islam di negara ini. Perbedaan dalam pendekatan, kurikulum, manajemen, dan sumber daya antara pesantren tradisional dan sekolah Islam modern menciptakan tantangan dan peluang yang unik.

Salah satu dampak dari praktik dualisme ini adalah terjadinya disparitas dalam akses dan kualitas pendidikan Islam antara berbagai kelompok masyarakat. Sehingga pesantren tradisional yang memiliki peran penting dalam memelihara tradisi keagamaan dan budaya di Indonesia sering kali menghadapi keterbatasan dalam menyediakan layanan pendidikan yang seimbang antara agama dan ilmu pengetahuan umum. Pada hal disisi lain, sekolah Islam modern, meskipun menawarkan pendekatan pendidikan Islam yang lebih modern dan terstruktur, tidak selalu mampu menjangkau semua lapisan masyarakat terutama di daerah pedesaan atau daerah terpencil (Permatasari, 2017).

Untuk mengatasi praktik dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia, diperlukan pendekatan yang holistik dan inklusif. Pemerintah dan lembaga masyarakat perlu bekerja sama untuk mengembangkan kebijakan yang mendukung integrasi kurikulum, peningkatan aksesibilitas, dan peningkatan kualitas pendidikan Islam di semua tingkatan. Selain itu, pendidikan Islam juga harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tuntutan globalisasi tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keagamaannya. Dengan demikian, praktik dualisme dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia dapat diatasi, dan pendidikan Islam dapat menjadi lebih inklusif, relevan, dan berdaya saing global.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Dualisme sistem ini tidak terlalu menjadi masalah jika dimaknai sebagai pembagian tugas, misalnya Kemenag mengurus pendidikan agama dan Kemendiknas mengurus pendidikan umum, kemudian mereka bersama-sama membuat sistem pendidikan yang maju dan ideal. Akan tetapi dualisme sistem pendidikan ini justru seolah menjadi payung hukum yang sah untuk melakukan diskriminasi terhadap pendidikan agama. Diskriminasi inilah yang menjadi inti dari pada dikotomi. Maka tidak heran, jika kita seringkali menemukan perlakuan yang tidak seimbang antara madrasah dan sekolah umum, mulai dari diskriminasi anggaran, bantuan pemerintah, serta hak kesetaraan.

Islam sangat menentang praktik dikotomi pendidikan. Menurutnya ilmu tanpa agama akan

menjadi bencana. Allah SWT telah memperingatkan di dalam Al-Qur'an surat al-Rum ayat 41 bahwa telah tampak kerusakan di dunia akibat tangan-tangan manusia yang tidak didasari dengan agama. Jika Barat berkembang pesat karena memisahkan diri dari agama, maka Islam justru menjadi mercusuar dunia karena memegang teguh agamanya. Ini terjadi karena sejak awal Islam tidak pernah menolak ilmu pengetahuan. Bagi Islam, Ilmu pengetahuan justru akan membuat agama menjadi kokoh tak tergoyahkan.

### **Saran**

Adapun saran yang peneliti sampaikan adalah pemerintah harus berani memberikan kebebasan bagi ummat Islam dalam menjalankan pendidikannya, khususnya memberi kewenangan dalam mengutus kurikulum secara mandiri tentunya dalam bingkai pengawasan yang terstruktur. Diharapkan pelaksana pendidikan agar menciptakan inovasi yang baru dalam melahirkan generasi emas dari lulusan madrasah sehingga peserta didik madrasah mampu bersaing dengan lembaga pendidikan lain di tingkat global.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abu Bakar, M. Y. (2015). Problematika Pendidikan Islam di Indonesia. *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam*, 1(1), 99–123. <https://doi.org/10.26594/dirasat.v1i1.507>
- Basyit, A. (2019). Dikotomi Dan Dualisme Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Tahdzibi: Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 15–28.

- <https://doi.org/10.24853/tahdzibi.4.1.15-28>
- Hasanah, F. N. (2023). Optimalisasi Kompetensi Pedagogik Calon Guru PAI Melalui Implementasi Flipped Classroom Berbasis Moodle pada Microteaching. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4, 261–271.  
<https://doi.org/10.31538/munaddhomah.v4i2.448>
- Fahmi, K. & Fahmi, F. (2021). Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam Di Indonesia. *At-Tazakki*, 5(1), 19–36.
- Fardinal, F., Ali, H., & Anwar US, K. (2022). Mutu Pendidikan Islam: Jenis Kesisteman, Konstruksi Kesisteman Dan Berfikir Kesisteman. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 3(4), 370–382.  
<https://doi.org/10.31933/jemsi.v3i4.894>
- Febriana, L., & Firmasari, D. (2021). Dualisme Dan Dikotomi Pendidikan Di Indonesia (Tinjauan Historis dan Telaah Kebijakan Pemerintah). *El-Ta'dib*, 1(2), 175–188.
- Hadi, S., Maisaroh, S., Hidayat, A., & Andrian, D. (2022). An Instrument Development to Evaluate Teachers' Involvement in Planning the Schools' Budgeting at Elementary Schools of Yogyakarta Province. *International Journal of Instruction*, 15(2), 1087–1100.
- <https://doi.org/10.29333/iji.2022.15260a>
- Madaniyah, J., Fauzi, A., Islam, U., Sunan, N., Djati, G., & Makbuloh, D. (2020). *Isu-Isu Global Dan Kesiapan Guru Pai Dalam Menghadapinya Achmad Fauzi, Mohammad Erihadiana dan Uus Ruswandi 1*, 10, 251–270.
- Ma'ruf, A. (2016). Kebijakan Politik Kelembagaan Pendidikan Islam Di Indonesia Pada Masa Reformasi. *Al-Murabbi*, 1(1), 19–30.
- Muhammad, A. (2021). Eksistensi Pendidikan Agama Islam Dan Perkembangannya di Sekolah Umum. *AI Urwatul Wutsqa: Kajian Pendidikan Islam*, 1(2), 27–49.
- Muhammad, P. R., & Bagus Wiguna, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anggaran Pendidikan Di Indonesia Tahun 2015-2021. *Journal of Development Economic and Social Studies*, 2(4), 920–927.
- Mukhlisin, A. (2021). Dualisme Penyelenggaraan Pendidikan. *Cybernetics: Journal Educational Research and Sosial Studies*, 2(1), 62–72.
- Mulyatiningsih, E., & A. (2005). *Metode Penelitian Evaluasi Kebijakan Pendidikan Oleh*. 15.
- Mustikaningrum, G., Pramusinta, L., Ayu, S., & Umar, M. (2020). The

- Implementation of Character Education Integrated To Curriculum and Learning Methods During Covid-19 Pandemic. *AULADUNA: Jurnal Pendidikan Dasar Islam*, 7(2), 154–164.
- Nasucha, J. A. (2019). Pendidikan Islam, Formal, Informal, Non Formal, Peraturan Pemerintah. DOI: [10.31219/osf.io/mxryj](https://doi.org/10.31219/osf.io/mxryj)
- Noor, W. (2017). Mengintegrasikan Manajemen Sumber Daya Manusia. *Jurnal TARBAWI*, 3(02), 153–167.
- Permatasari, D. Y. (2017). Dinamika Pendidikan Islam Di Indonesia (Sebuah Tinjauan Historis-Kronologis). *Falasila*, 8(2), 223–240.
- Singh, J. (2013). Critical appraisal skills programme. *Journal of Pharmacology and Pharmacotherapeutics*, 4(1), 76–77. <https://doi.org/10.4103/0976-500X.107697>
- Sudaryo, A. (2023). Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia. *INTERDISIPLIN: Journal of Qualitative and Quantitative Research*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v1i1.1>
- Szegedi, K., Gyóri, Z., & Juhász, T. (2024). Factors affecting quality of life and learning-life balance of university students in business higher education. *Humanities and Social Sciences Communications*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.1057/s41599-024-02603-7>
- Wahab, A. (2016). Dualisme Pendidikan Di Indonesia. *Lentera Pendidikan : Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 16(2), 220–229. <https://doi.org/10.24252/lp.2013v16n2a9>
- Zakaria, M. (2022). Dualisme Pendidikan Kegelisahan Akademik Profesi. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam Dan Isu-Isu Sosial*, 20(2), 45–62. <https://doi.org/10.37216/tadib.v20i2.724>

---

*How to cite this paper :*

- Rizal, M., Iskandar., & Suryadi, A. (2024). Mutu Pendidikan Islam Ditinjau Dari Praktik Dualisme Pendidikan Nasional. *Jurnal Dedikasi Pendidikan*, 8(2), 665–678.